



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Nama/ Unit Organisasi : KPU Kabupaten Sarolangun

Tahun : 2020

No (1)	Uraian (2)	Cara Penghitungan (3)	Sumber Data (4)
1	Persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang menyelenggarakan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	Jumlah tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dilaksanakan sesuai jadwal ketentuan oleh KPU Sarolangun dibagi dengan jumlah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan yang ditetapkan oleh KPU RI.	Berita Acara Hasil Pleno.
2	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dibagi dengan jumlah seluruh pemilih.	Berita Acara Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara
3	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan	Jumlah pemilih perempuan yang menggunakan hak pilih dibagi dengan jumlah seluruh pemilih perempuan.	Berita Acara Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara
4	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan	Jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih dibagi dengan jumlah seluruh pemilih disabilitas	Berita Acara Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara
5	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	Jumlah pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih dibagi dengan jumlah seluruh pemilih yang berhak memilih	Berita Acara Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara
6	Persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan Pemilihan tanpa konflik.	Jumlah kasus/kejadian pada tahapan Pemilihan dibagi dengan jumlah seluruh tahapan kegiatan Pemilihan	Laporan penanganan kasus dari pihak berwajib.
7	Persentase Penyelenggara Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilihan.	Jumlah PPK dan PPS yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dibagi dengan jumlah seluruh PPK dan PPS di KPU Sarolangun.	Laporan pelanggaran kode etik Badan Ad Hoc ke DKPP Laporan pelanggaran kode etik Badan Ad Hoc ke Bawaslu
8	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU.	Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Sarolangun dibagi dengan jumlah seluruh sengketa hukum masuk ke MK, PTUN, Bawaslu.	Hasil Putusan Peradilan MK, PTUN dan Bawaslu.
9	Persentase KPU Kabupaten yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Penggunaan Anggaran yang tepat waktu dan valid.	Jumlah laporan pertanggungjawaban pengelolaan penggunaan anggaran dari setiap kegiatan dibagi dengan jumlah seluruh kegiatan yang dilakukan KPU Sarolangun.	Laporan pertanggungjawaban keuangan.

Sarolangun, 2 Januari 2020

KETUA,



MUHAMMAD FAKHRI. HS